

# Strategi Sosialisasi dan Pelatihan Inovatif untuk Meningkatkan Aktivitas Politik dan Partisipasi Generasi Z dalam Kebijakan Publik

Masbullah<sup>1\*</sup>  
Salmi Yuniar Bahri<sup>2</sup>  
Moh. Jihad<sup>3</sup>  
Yuniar Affandy<sup>4</sup>  
Nova Hari Santhi<sup>5</sup>  
Sandy Ari Wijaya<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Program Studi Administrasi Publik, ITS Kes Muhammadiyah Selong  
E-mail: [masbullah88@gmail.com](mailto:masbullah88@gmail.com)<sup>1</sup>

## Abstrak

Artikel ini membahas upaya sosialisasi dan pelatihan inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif Generasi Z dalam dunia politik dan kebijakan publik. Dengan menggali strategi baru dan pendekatan yang relevan dengan karakteristik generasi ini, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana mendorong keterlibatan Gen Z dapat menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih terlibat secara politis. Melalui analisis konsep sosialisasi dan metode pelatihan yang efektif, artikel ini memberikan wawasan mendalam tentang cara mendekati dan mendukung Generasi Z agar mereka dapat lebih efektif berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik dan implementasi kebijakan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan berharga bagi para praktisi dan pembuat kebijakan yang berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan partisipasi positif dari Generasi Z dalam konteks politik dan kebijakan publik.

**Kata kunci:** Sosialisasi, Pelatihan, Generasi Z, Aktivitas Politik, Manajemen, Kebijakan Publik

## Abstract

This article discusses efforts in socialization and innovative training aimed at enhancing the active participation of Generation Z in the realms of politics and public policy. By exploring new strategies and approaches relevant to the characteristics of this generation, the research delves into how fostering Gen Z involvement can be key to creating a more politically engaged society. Through an analysis of the concepts of socialization and effective training methods, this article provides profound insights into approaching and supporting Generation Z so that they can more effectively participate in the political decision-making process and policy implementation. The findings of this research are expected to serve as a valuable guide for practitioners and policymakers striving to create an environment that supports the positive growth and participation of Generation Z in the context of politics and public policy.

**Keywords:** Socialization, Training, Generation Z, Political Engagement, Management, Public Policy

## PENDAHULUAN

Demokrasi dapat berhasil terwujud dengan meningkatnya keterlibatan aktif warga negara dalam kegiatan politik. Tingkat partisipasi politik yang tinggi dianggap sebagai kunci utama dalam menjalankan sistem politik [1]. Namun, tidak hanya keterlibatan politik semata, melainkan pentingnya juga untuk meningkatkan kesadaran kritis warga negara guna mencapai sistem politik yang demokratis, berdaulat, dan bermutu, sehingga mendorong keberlanjutan pemerintahan yang kuat. Di era saat ini, gelombang bonus demografi memberikan dampak signifikan pada struktur umur penduduk Indonesia, yang ditandai oleh peningkatan jumlah individu usia produktif dan penurunan jumlah individu usia non-produktif. Fenomena ini membuka peluang bagi generasi milenial untuk berperan sebagai kontributor utama dalam membentuk struktur piramida kependudukan dengan tingkat produktivitas yang cukup tinggi [2]. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa generasi milenial memiliki peran besar dan pengaruh signifikan dalam pengembangan ekonomi, politik, dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Di Provinsi NTB, dengan total populasi sebanyak 5,32 juta penduduk, sekitar 69,77

persennya merupakan usia produktif yang tersebar baik di perkotaan maupun perdesaan [3]. Namun, tantangannya adalah rendahnya tingkat melek informasi, sosial, dan politik, menyebabkan generasi Z di NTB mengalami keterbelakangan dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya [4]. Di Kabupaten Lombok Timur, jumlah generasi milenial mencapai 184.052 jiwa, menjadikannya sebagai salah satu generasi produktif yang berperan penting dalam kemajuan pembangunan dan perekonomian [5].

Hasil penelitian tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) menunjukkan bahwa generasi milenial di Kabupaten Lombok Timur dianggap sebagai kelompok yang produktif, kritis, dan memiliki tingkat literasi yang baik. Namun, realitanya, kondisi ini bertolak belakang, di mana sebagian besar dari mereka tidak memahami peran mereka sebagai agen perubahan yang seharusnya memiliki sikap politis. Secara konkret, sikap dan nilai-nilai yang dimiliki oleh generasi milenial di Merauke masih belum mencerminkan kesadaran terhadap pentingnya keterlibatan warga negara (civic engagement) dalam menanggapi segala aktivitas politik negara. Di sisi lain, tingkat partisipasi politik yang rendah disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan sikap apatis terhadap kehidupan politik [6].

Berdasarkan wawancara tim PKM, rendahnya tingkat partisipasi dan literasi politik menjadi alasan generasi milenial enggan terlibat dalam aktivitas politik untuk mempengaruhi sistem politik. Oleh karena itu, tim PKM memberikan kontribusi penuh untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi generasi milenial di Merauke. Tujuannya adalah menciptakan perubahan radikal dalam sikap, nilai, dan pola pikir generasi milenial. Melalui sosialisasi politik dan peningkatan literasi, diharapkan partisipasi politik dan kesadaran kritis generasi milenial dapat meningkat. Semua ini dilakukan dengan tujuan membentuk karakter generasi milenial yang produktif, memiliki kesadaran terhadap situasi sosial-politik, dan mendorong terwujudnya sistem politik yang demokratis. Partisipasi, menurut kamus besar bahasa Indonesia, berarti turut serta dalam suatu kegiatan. Partisipasi juga dapat diartikan sebagai keterlibatan individu dalam proses interaksi sosial di masyarakat dengan kesadaran nyata, tanpa rasa terpaksa, dan dengan tanggung jawab. Dalam konteks politik, berpartisipasi berarti menjalankan politik, yang pada dasarnya melibatkan interaksi antar manusia dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya, yang kemudian dialihkan kepada orang lain dan dimanfaatkan dalam kegiatan bersama [7]. Implementasi politik di kalangan generasi milenial terlihat dari partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan, seperti pemilu legislatif dan eksekutif, pemilihan ketua di kelurahan atau badan perwakilan mahasiswa, serta perhatian khusus terhadap panduan yang dikeluarkan oleh pemerintah [8]. Saat ini, tingkat partisipasi politik di kalangan kaum muda atau milenial sangat rendah [2]. Meskipun menjadi agen perubahan, generasi milenial tampaknya belum sepenuhnya mengoptimalkan kemampuan berpikir mereka untuk memahami secara lebih mendalam bahwa implementasi kebijakan memiliki peran krusial dalam membentuk arah kehidupan. Sebagai kontrol sosial, generasi milenial juga belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam melindungi dan mendukung masyarakat yang terdampak oleh kebijakan publik. Kebijakan publik, sebagai hasil dari berbagai kepentingan, tidak dapat dilepaskan dari aktivitas politik.

Kebijakan publik dapat dijelaskan secara sederhana sebagai keputusan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, dengan harapan terjadinya perubahan yang diinginkan [9]. Generasi milenial diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis dan mampu berpikir secara sistematis terutama dalam konteks politik. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk terus diberikan latihan studi kasus guna memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mengembangkan kepekaan sosial yang tinggi.

## METODE

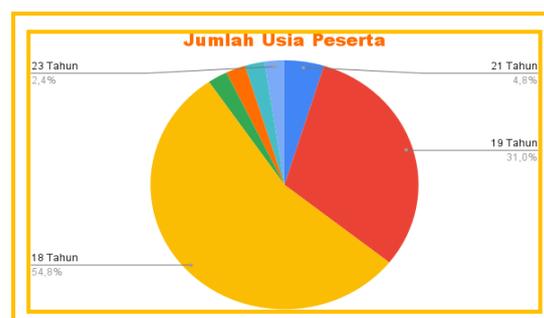
Dalam kegiatan ini, metode yang diterapkan adalah sosialisasi dan pelatihan. Secara umum, model sosialisasi dan pelatihan diimplementasikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Pelatihan bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan yang diterapkan di lembaga tertentu terkait dengan kebutuhan pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian, tujuan, dan tantangan lainnya. Model pelatihan umumnya dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu terkait kebutuhan pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian, tujuan, dan hambatan lainnya.

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan selama 6 (enam) hari, yakni pada tanggal 18 hingga 23 Oktober 2023, di Sekretariat KU Maju Bersama, dengan melibatkan 55 peserta. Masbullah, S.Kom, MM, bersama tim PkM ITSkes Muhammadiyah Selong, bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi dan pelatihan. Agenda latihan mencakup pre-test, materi, dan post-test, dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman peserta. Proyek pengabdian masyarakat ini menciptakan platform bagi generasi milenial untuk memahami politik kewarganegaraan. Salah satu peranannya adalah membantu mereka memahami peran sebagai anggota masyarakat yang memberikan sosialisasi dan advokasi kepada mereka yang terdampak kebijakan daerah. Mereka juga diarahkan untuk memantau kebijakan yang dikeluarkan daerah dan menyadari pentingnya partisipasi dalam demokrasi.

Hasil dari pengabdian ini adalah terbentuknya platform bagi generasi muda untuk proses pembelajaran dengan pengembangan sikap kritis. Salah satu indikatornya adalah kemampuan intelektual untuk mendalami politik, yang menjadi komponen kunci agar pemuda dapat memberikan dukungan kepada masyarakat yang terpengaruh oleh program pemerintah. Pentingnya memahami perbedaan kepentingan berbagai pihak tidak bisa diabaikan dalam konteks kebijakan publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

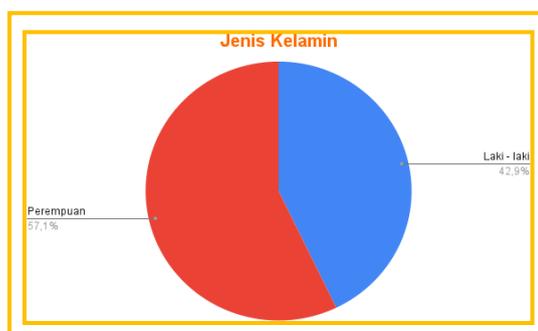
Dalam pelaksanaannya, materi yang disampaikan kepada peserta tidak hanya terbatas pada pendidikan politik, tetapi juga mencakup aspek partisipasi politik mahasiswa. Indonesia secara umum menghadapi tantangan dalam literasi dan pendidikan politik. Penyelenggara pemilu perlu terus memperbaiki program literasi politik untuk masyarakat, terutama bagi kelompok usia 18-35 tahun, yang sering disebut sebagai kelompok milenial. Pendidikan politik pada dasarnya merupakan usaha untuk memastikan bahwa setiap warga negara terlibat secara kritis dalam politik dengan memperoleh keterampilan dan kemampuan politik yang diperlukan. Ketika warga negara terlibat dalam kegiatan politik, termasuk partisipasi politik formal seperti pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, atau bentuk partisipasi politik lainnya, diperlukan keterampilan politik yang sesuai. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya keterlibatan aktif dalam politik dengan membekali peserta dengan keterampilan dan pengetahuan politik yang relevan. Langkah awal yang diambil oleh Tim Pengabdian Masyarakat adalah melakukan pemetaan awal atau "mapping." Tujuannya adalah untuk menentukan jumlah sampel dan usia peserta, sehingga kegiatan pengabdian dapat disesuaikan dan diselenggarakan secara efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



**Gambar 1.** Berdasarkan Usia

Berdasarkan hasil penelusuran, dapat dilihat bahwa peserta kegiatan memiliki distribusi

usia yang beragam. Peserta yang berusia 18 tahun menyumbang sebanyak 54,8%, atau setara dengan 30 orang. Kelompok usia 19 tahun mencapai 30% dari total peserta, sedangkan usia 21 tahun mencapai 4,8%, dan usia 23 tahun sebesar 2,4%. Sementara itu, dalam hal jenis kelamin, peserta didominasi oleh perempuan, dengan jumlah sebanyak 32 orang atau 57%. Laki-laki, pada sisi lain, memiliki jumlah peserta sebanyak 23 orang atau 43%. Distribusi ini menunjukkan keragaman partisipasi antara jenis kelamin dalam kegiatan tersebut.



**Gambar 2.** Berdasarkan Jenis Kelamin

a. Fungsi Sosialisasi politik bagi warganegara

Program PkM yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, difokuskan pada sosialisasi dengan sasaran langsung memberikan pemahaman terkait dengan pentingnya sosialisasi politik bagi generasi muda saat ini. Pada hari tersebut, kegiatan melibatkan penyampaian materi yang mendalam untuk memberikan pemahaman kognitif dan afektif kepada para peserta. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman yang lebih dalam melalui pemberian materi yang merinci definisi sosialisasi politik dan implikasinya terhadap demokrasi serta kebijakan publik di masa yang akan datang. Dengan demikian, diharapkan peserta dapat memahami secara komprehensif peran dan dampak dari sosialisasi politik, yang pada gilirannya akan memperkuat partisipasi mereka dalam kehidupan demokratis dan proses pembentukan kebijakan publik. Kegiatan ini dimulai dengan memberikan pemahaman melalui penjelasan tentang definisi sosialisasi politik, yang diartikan sebagai "proses membentuk, mempertahankan, dan mengubah budaya politik. Sosialisasi politik merupakan suatu proses pengembangan budaya politik dalam masyarakat, yang melibatkan penanaman nilai-nilai politik. Sebagai contoh, dalam pendidikan di Indonesia, konsep kebhinekaan diajarkan dan ditanamkan sejak dini sebagai bagian dari pengajaran dan penanaman nilai. Pancasila dihargai sebagai hasil dari proses sosialisasi politik di masyarakat yang luas. Ini mencerminkan proses pengenalan dan penguatan nilai-nilai politik, yang akhirnya membentuk orientasi politik individu dan membantu mereka memahami peran masyarakat dalam sistem politik yang stabil dan berkelanjutan.

Selanjutnya, pemateri menjelaskan bahwa sosialisasi politik dan pendidikan politik merupakan upaya untuk mempertahankan atau mengubah budaya politik suatu masyarakat. Sosialisasi politik adalah suatu proses di mana masyarakat mewariskan budaya politiknya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui transfer nilai, ide, sikap, dan terutama perilaku politik, kegiatan ini memfasilitasi pembentukan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya yang ingin dilestarikan atau diubah. Oleh karena itu, sosialisasi politik menjadi proses di mana seorang individu dapat memahami sistem politik, yang pada akhirnya membentuk sifat persepsi dan tanggapan politiknya terhadap fenomena politik. Selanjutnya, pemateri menjelaskan bahwa sosialisasi politik memerlukan evaluasi terhadap lingkungan budaya masyarakat, lingkungan politik, dan lingkungan sosial. Individu juga melakukan penyelidikan terhadap sikap politik dan evaluasi politiknya. Hubungan paling mendasar antara sistem sosial dan politik adalah melalui sosialisasi politik, meskipun setiap sistem dapat memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Dari perspektif politik tertentu, sosialisasi politik dianggap sebagai proses yang panjang dan kompleks yang timbul dari interaksi antara kepribadian individu dan pengalaman politik yang relevan bagi mereka. Peserta diharapkan memahami sosialisasi politik sebagai sarana untuk

memberikan pendidikan kepada individu tentang makna dan evolusi politik serta cara yang benar untuk terlibat dalam kegiatan politik. Sosialisasi politik bertujuan untuk memberikan informasi kepada warga, terutama yang memiliki hak pilih, tentang pentingnya politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberhasilan sosialisasi politik diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif antar individu. Dalam tindakan atau proses sosialisasi politik, informasi dapat disampaikan melalui berbagai agen atau sarana, termasuk keluarga, sekolah, kelompok sosial, lingkungan pekerjaan, media massa, dan kontak politik langsung.

b. Sosialisasi dan Pelatihan Inovatif untuk Meningkatkan Aktivitas Politik dan Partisipasi Generasi Z dalam Kebijakan Publik

Pada tanggal 19 Oktober 2023, kegiatan dilanjutkan dengan materi yang membahas peran partisipasi politik bagi generasi milenial. Partisipasi politik dianggap sebagai keterampilan penting dan merupakan bagian integral dari masyarakat saat ini. Dalam konteks luas, "politik" mengacu pada penyelenggaraan kebijakan politik dan hubungan interpersonal yang didasarkan pada transfer dan penerapan kekuasaan [7]. Istilah ini sesuai dengan asal kata "politik" dalam bahasa Yunani yang berasal dari "polis" dan berarti negara kota [10]. Bentuk administrasi politik bagi generasi milenial dapat terlihat dari tingkat partisipasi politik dalam berbagai kegiatan, seperti pemilihan umum, baik legislatif maupun eksekutif, pemilihan ketua dalam suatu komunitas atau organisasi kemahasiswaan, dan perhatian terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Namun, hanya sebagian kecil milenial yang aktif secara politik. Meskipun dianggap sebagai agen perubahan, generasi milenial terkadang belum memiliki kapasitas intelektual untuk terlibat lebih dalam dalam penerapan politik, yang merupakan komponen terpenting dari manajemen kehidupan. Sebagai kontrol sosial, mereka belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat yang mungkin terdampak oleh pelaksanaan program negara. Perbedaan kepentingan berbagai pihak tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik, sehingga partisipasi politik dalam kebijakan publik menjadi sangat relevan.

Dalam kegiatan ini, upaya dilakukan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya partisipasi politik. Secara konseptual, partisipasi merujuk pada kegiatan sukarela warga negara yang terlibat dalam proses pemilihan dan pergantian kekuasaan, yang pada gilirannya membentuk kebijakan umum. Tim PkM kemudian memberikan pemahaman bahwa partisipasi mencakup aktivitas warga negara (pemilih) untuk memengaruhi hasil akhir dari proses politik sesuai dengan prosedur, seperti pemungutan suara untuk menentukan bakal calon yang akan menduduki jabatan politik dan berpartisipasi dalam kampanye politik. Selain itu, partisipasi juga dapat diukur melalui empat unsur, yaitu pemungutan suara, aktivitas kampanye, aktivitas masyarakat, dan kontak langsung dengan pejabat publik.

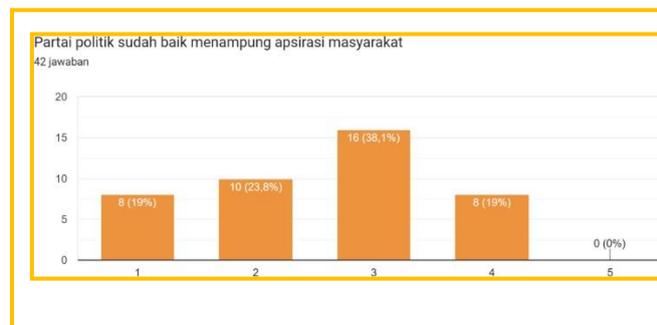
c. Pemantauan dampak sosialisasi.

Pada tanggal 20 Oktober 2023, kegiatan dilanjutkan dengan langkah untuk mengukur dampak sosialisasi terhadap peserta. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengevaluasi sejauh mana sosialisasi tersebut mempengaruhi peserta, dengan mengukur kemampuan kognitif, afektif, dan evaluatif mereka. Unsur kognitif dalam evaluasi ini mencakup pengetahuan dan keyakinan politik, contohnya adalah mendorong pengetahuan warga negara mengenali rekam jejak dan memahami visi-misi dari bakal calon. Unsur afektif mencakup sikap dan nilai terhadap keadaan atau proses politik, sebagai contoh mendorong warga negara untuk aktif merespons informasi politik terkait dengan kegiatan pemilu. Terakhir, unsur evaluatif merujuk pada sikap moralitas dalam merespons proses politik, seperti memberikan pemahaman kepada warga negara agar mampu menyaring informasi politik, menghindari opini, dan mengenali informasi yang tidak benar (hoax). Dengan mengukur ketiga unsur ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak sosialisasi politik terhadap peserta, serta sejauh mana mereka dapat menerapkan pengetahuan dan sikap yang diperoleh dalam proses politik yang sebenarnya.



Gambar 3. Data Pemilih

Dari segi unsur kognitif, hasil tes menunjukkan bahwa dominan peserta memilih opsi "sangat setuju" (5) sebesar 54,8% dalam hal pengetahuan tentang rekam jejak calon pemimpin politik. Sementara itu, peserta yang memilih opsi "setuju" (4) sebanyak 35,7%, yang memilih opsi "netral" (3) sebanyak 4,8%, dan yang memilih opsi "tidak setuju" (2) dan "sangat tidak setuju" (1) masing-masing sebesar 0%. Ini menunjukkan tingkat tinggi kesadaran dan penerimaan peserta terhadap informasi tentang rekam jejak calon pemimpin politik.



Gambar 4. Respon Partai Politik Tentang Aspirasi Rakyat

Dari simulasi mengenai pemahaman tentang politik, terlihat bahwa peserta menunjukkan tingkat kepercayaan yang bervariasi. Peserta yang memilih opsi "sangat setuju" (5) tidak ada, sementara yang memilih opsi "setuju" (4) sebesar 19%. Lebih banyak peserta yang memilih opsi "ragu-ragu" atau "netral" (3) sebesar 38%, yang memilih opsi "kurang setuju" (2) sebesar 24%, dan yang memilih opsi "tidak setuju" (1) sebesar 19%. Hal ini menunjukkan bahwa ada variasi dalam pemahaman dan sikap peserta terhadap topik politik, dengan sebagian besar peserta menunjukkan ketidakpastian atau netralitas terkait pemahaman politik. Dalam simulasi untuk mengukur unsur afektif, yang mencakup sikap dan nilai terhadap keadaan atau proses politik, peserta menunjukkan hasil yang signifikan. Persepsi bahwa penggunaan hak pilih merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara direspon positif oleh peserta, dengan 54% memilih opsi "sangat setuju" (SS), 33% memilih "setuju" (S), 2,4% memilih "netral" atau "ragu-ragu" (3), dan 2% memilih "tidak setuju" (TS). Ini menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen yang tinggi terhadap partisipasi dalam proses politik melalui penggunaan hak pilih.



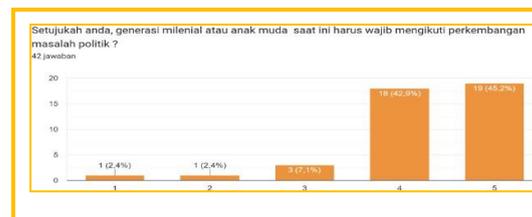
**Gambar 5. Pemahaman Politik**

Melihat hasil dari simulasi ini, dapat disimpulkan bahwa peserta kegiatan, setelah mendapatkan sosialisasi, berhasil memahami arti, peran, dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam proses politik. Kesadaran peserta terlihat meningkat, dan mereka menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya partisipasi dalam kehidupan politik. Hal ini menandakan bahwa proses sosialisasi dapat dianggap berhasil dan memberdayakan peserta untuk berperan aktif dalam proses politik.



**Gambar 6. Pemahaman Peserta Setelah Sosialisasi**

Simulasi mengenai persepsi peserta tentang partisipasi menunjukkan bahwa peserta cenderung bersikap ragu-ragu terhadap situasi dan kondisi partisipasi saat ini. Hal ini terlihat dari jumlah peserta yang memilih opsi "ragu-ragu" (3) sebesar 61%, yang memilih "setuju" (4) sebesar 26%, dan "sangat setuju" (5) sebesar 4,8%. Meskipun terdapat tingkat ketidakpastian, hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi telah memberdayakan peserta dengan memberikan pemahaman yang baik terkait partisipasi politik. Sementara itu, unsur evaluatif mencerminkan bahwa nilai rata-rata peserta menunjukkan hal yang positif, dengan persentase "sangat setuju" (5) sebesar 45% dan "setuju" (4) sebesar 42%. Ini menunjukkan bahwa peserta memberikan penilaian positif terhadap proses sosialisasi yang mereka terima. Berdasarkan hasil ini, proses evaluasi dan monitoring menunjukkan hasil yang signifikan, yang berimplikasi pada peningkatan kemampuan kognitif, afektif, dan evaluatif para peserta kegiatan.



**Gambar 7. Grafik Partisipasi Politik**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Diakhir kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi efektif meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan evaluatif peserta. Sosialisasi dapat dianggap sebagai pilihan metode edukasi yang dapat menjadi penanda baru dalam peningkatan partisipasi politik. Meningkatkan aktivitas generasi milenial dalam politik, terutama dalam pemilu, memerlukan strategi yang matang. Diperlukan desain strategis untuk meningkatkan kesadaran politik generasi milenial, yang pada gilirannya akan menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Dalam upaya memperkuat literasi politik, perlu dibangun dan dibentuk jejaring partisipatif dengan melibatkan institusi formal dan informal. Jejaring partisipatif ini dapat melibatkan civil

society, kelompok profesional, komunitas masyarakat, dan institusi pendidikan yang dianggap mampu berperan sebagai agen yang memberikan pemahaman akan pentingnya kesadaran politik. Jejaring ini dapat bekerja mengartikulasikan kepentingan umum, menyelenggarakan pendidikan pemilu, dan mendorong aktivitas warga negara untuk meningkatkan partisipasi politik serta kesadaran akan hak politik mereka.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. F. (2018). Menegakkan Partisipasi Pemilih, Memperkuat Literasi Politik. *Bumi Sultra News*, 1-6.
- Arifin, A., Sunarto, S., & Cahyono, H. (2018). Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Mahasiswa Prodi PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. *Edupeedia*, 2(2), 123. doi: 10.24269/ed.v2i2.144.
- BPS Indonesia. (2018). *Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- BPS Nusa Tenggara Barat. (<https://ntb.bps.go.id/>)
- BPS Nusa Tenggara Barat. (<https://ntb.bps.go.id/>)
- Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2013. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX. diunduh pada 17 Oktober 2023 jam 20:39.
- Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Indonesia. 2009. Panduan Pengajaran Proposal Hibah Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia. Jakarta: universitas Indonesia
- Muadi, S., Ismail, & Sofwani, A. (2016). Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195-224.
- Permendagri No. 36 tahun 2010 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik
- Perwal Nomor 62 Tahun 2012 tentang Tupoksi Bakesbangpol Inpres No. 12 tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda
- Poerwadaminta, (1995). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putra, Fadilah. (2003). Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik: Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik Dalam Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahimallah, M. T. A., Adam, A. F., & Sudirman, F. A. (2019). Orientasi Politik Kelas Milenial Dalam Pemilihan Gubernur: Sebuah Catatan Survey. *Jurnal*, 10(2), 71-83.
- Reportasenews.com. (2018). Partisipasi Pemilih Pilgub di Kabupaten Merauke Capai.
- Soehartono, Irawan, (2002). Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Surbakti, Ramlan. (1999) Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suyitno. (2014). Laporan akhir penelitian (kehadiran dan ketidakhadiran pemilih TPS dalam pelaksanaan pemilihan Umum Kota Malang UU No. 12 Tahun 2015 tentang Jaminan dan Perlindungan Negara
- Wijaya Amin Tunggal, (1993). Manajemen suatu Pengantar, Jakarta: Cetakan Pertama, Rineka Cipta Jaya.
- Winardi, J, (1996). Pengantar Teori Sistem dan Analisis Sistem, Bandung: Mandar Maju.
- Wirawan, R., Mardiyono, & Nurpratiwi, R. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *JISIP Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 1-87.